



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut, salah satunya dilakukan melalui kegiatan Persidangan. *"Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas". (kompasiana.com)*

Penyelenggaraan persidangan (rapat-rapat) merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi DPR. Semua pengambilan keputusan DPR pada dasarnya secara formal dilakukan dalam persidangan. Oleh sebab itu, akses menghadiri sidang-sidang (rapat) menjadi bagian dari asas keterbukaan dan kunci penting bagi partisipasi masyarakat. Rapat DPR yang bersifat terbuka, menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan DPR yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan Persidangan DPR dilaksanakan 5 (lima) kali Masa Sidang untuk 1 tahun dan dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan, yang salah satunya adalah Komisi.

Biro Persidangan I merupakan salah satu *supporting system* Dewan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Persidangan I mengemban tugas untuk memberikan dukungan administrasi serta persidangan bagi DPR dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan persidangan di Komisi (Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Kunjungan Kerja) serta kegiatan persidangan paripurna (dalam rangka pengambilan keputusan/persetujuan terhadap suatu Rancangan Undang-Undang dan/atau Pejabat Publik).

Dalam memberikan dukungan administrasi dan persidangan bagi DPR, Biro Persidangan I melaksanakan penyiapan Skenario Rapat, Laporan Singkat, dan Risalah Rapat. Produk-produk persidangan DPR mencerminkan bahwa kebijakan, keputusan,

dan program-program pembangunan telah dihasilkan DPR melalui pelaksanaan ketiga fungsi DPR.

Sebagai *supporting system*, Biro Persidangan I dituntut bekerja secara profesional, modern, dan akuntabel. Dalam upaya mewujudkan dukungan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Biro Persidangan I selalu melakukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai aspek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya perbaikan dapat dilihat dari aspek capaian kinerja organisasi dan aspek akuntabilitas keuangan. Kedua aspek tersebut sangat penting karena seluruh program dan kegiatan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja lembaga.

Sebagai unit pendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Persidangan I berkewajiban memberikan informasi mengenai capaian kinerja Biro Persidangan I dalam mencapai sasaran strategisnya serta mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Biro Persidangan I menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai salah satu unit yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, dalam melaksanakan tugasnya, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
- c. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan paripurna;

- d. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan paripurna;
- e. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah;
- g. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

## **2. Peran Strategis Biro Persidangan I**

Sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya Biro Persidangan I memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan persidangan di komisi, Persidangan Paripurna, dan dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI yang meliputi:

- a. Kegiatan DPR, yaitu:
  - 1) Pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna.
  - 2) Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan RUU;
  - 3) Pelaksanaan pembahasan anggaran mitra kerja Komisi;
  - 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan Pemerintah;
  - 5) Pelaksanaan pemberian persetujuan/pertimbangan terhadap pejabat publik (*fit and proper test*);
  - 6) Pelaksanaan pengawasan terhadap kasus-kasus spesifik.
- b. Kegiatan Sekretariat Komisi dan Kegiatan Sekretariat Persidangan Paripurna, yaitu:
  - 1) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.
  - 2) Pelaksanaan penyiapan dukungan rapat dan tata usaha Sekretariat Komisi di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
  - 3) Pelaksanaan penyiapan dukungan rapat dan tata usaha persidangan Paripurna; dan
- c. Kegiatan Penyusunan Risalah Rapat DPR RI.

## **B. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Persidangan I memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Komisi I s.d. Sekretariat Komisi XI, mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi I s.d. XI.

Bagian Sekretariat Komisi terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat.
- b. Subbagian Tata Usaha.

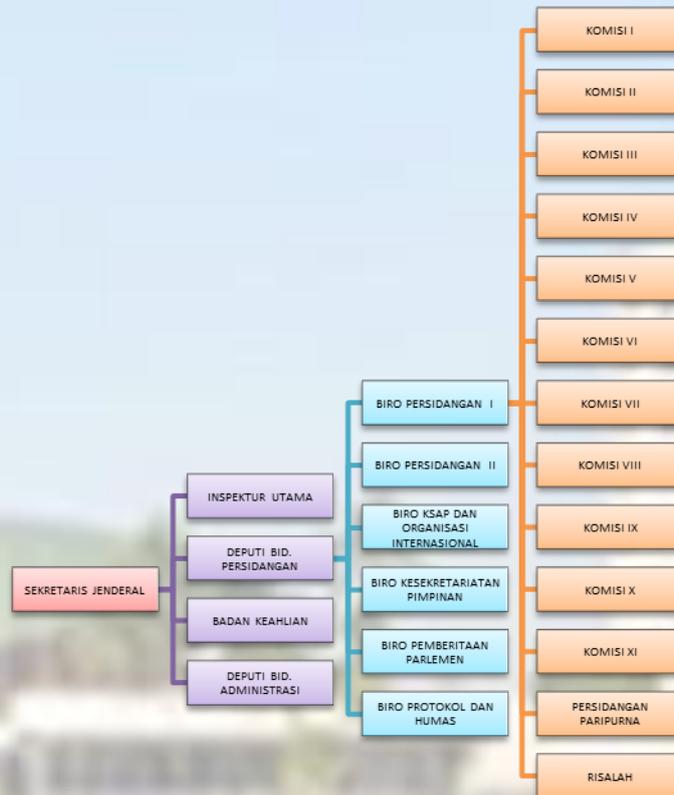
2. Bagian Persidangan Paripurna mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Persidangan Paripurna.

Bagian Persidangan Paripurna terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat.
- b. Subbagian Tata Usaha

3. Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyusunan Risalah rapat DPR.

Struktur Organisasi Biro Persidangan I sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini:



### C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan administrasi dan persidangan DPR, Biro Persidangan I didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari pegawai struktural yang bertugas di Sekretariat Komisi, Sekretariat Persidangan Paripurna, dan Bagian Risalah serta didukung juga oleh Jabatan Fungsional tertentu, yaitu Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

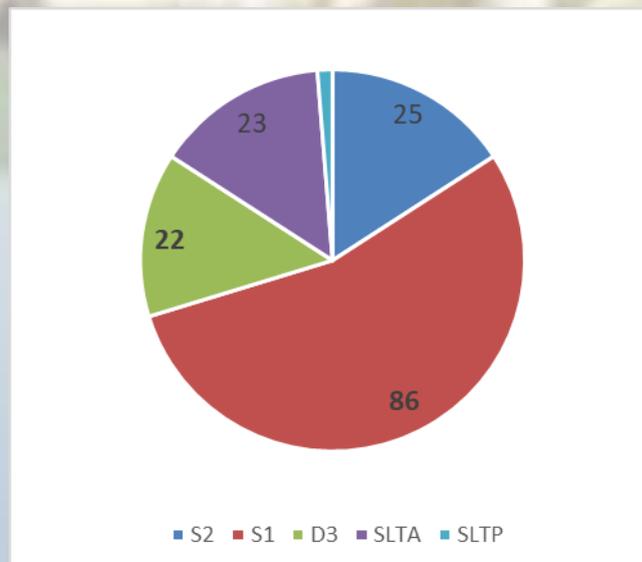
Adapun Jumlah SDM Biro Persidangan I sebanyak **158** pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan perincian, sebagai berikut:

1. Kepala Biro Persidangan I : 1 orang
2. Bagian Sekretariat Komisi I : 10 orang
3. Bagian Sekretariat Komisi II : 8 orang
4. Bagian Sekretariat Komisi III : 8 orang
5. Bagian Sekretariat Komisi IV : 8 orang
6. Bagian Sekretariat Komisi V : 10 orang
7. Bagian Sekretariat Komisi VI : 9 orang
8. Bagian Sekretariat Komisi VII : 7 orang

- 9. Bagian Sekretariat Komisi VIII : 9 orang
- 10. Bagian Sekretariat Komisi IX : 8 orang
- 11. Bagian Sekretariat Komisi X : 8 orang
- 12. Bagian Sekretariat Komisi XI : 11 orang
- 13. Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna : 5 orang
- 14. Bagian Risalah
  - a. Struktural : 6 orang
  - b. Fungsional :
    - 1) Perisalah Legislatif Ahli Madya : 9 orang
    - 2) Perisalah Legislatif Ahli Muda : 8 orang
    - 3) Perisalah Legislatif Ahli Pertama : 13 orang
    - 4) Asisten Perisalah Legislatif Penyelia : 7 orang
    - 5) Asisten Perisalah Legislatif Mahir : 3 orang
    - 6) Asisten Perisalah Legislatif Terampil : 10 orang

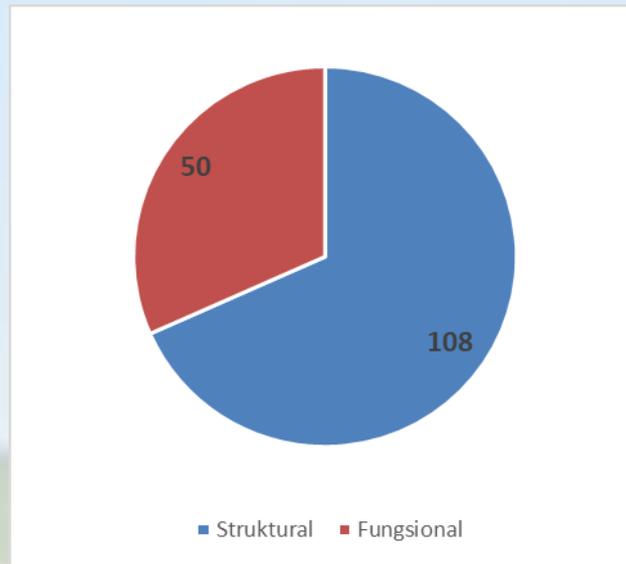
Adapun untuk Tingkat Pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Persidangan I terdiri dari S2 berjumlah 25 orang, S1 berjumlah 86 orang, D3 berjumlah 22 orang, SLTA berjumlah 23 orang, dan SLTP berjumlah 2 orang.

**Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I berdasar Pendidikan**



**Grafik Komposisi SDM Biro Persidangan I berdasar Jabatan**

### (Struktural dan Fungsional)



#### D. POTENSI DAN TANTANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan dukungan administrasi dan persidangan DPR, Biro Persidangan I memiliki potensi dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Potensi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan dukungan yang signifikan terhadap proses pelaksanaan persidangan DPR di Komisi, Persidangan Paripurna dan penyusunan risalah rapat. Jumlah SDM yang ada dirasakan masih jauh dari kebutuhan SDM ideal untuk mendukung kegiatan persidangan DPR. Untuk itu, Biro Persidangan I perlu didukung dengan penambahan jumlah SDM dalam memberikan dukungan persidangan DPR, dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan.

Disamping SDM, sarana dan prasarana juga memberikan potensi dan tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana berupa Teknologi Informasi sangat menunjang dalam memberikan dukungan persidangan. Akses informasi yang cepat sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana teknologi informasi yang tersedia. Melalui teknologi informasi, maka peran-peran Anggota DPR di dalam persidangan, hasil-hasil persidangan, maupun berbagai informasi publik lainnya merupakan dasar bagi transparansi parlemen yang lebih luas. Dengan akses yang baik serta tersedianya teknologi informasi yang diperlukan, masyarakat dapat mengetahui proses pembuatan

undang-undang serta pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil peran dan posisi yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan dan keputusan yang dihasilkan DPR benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus akan memperkuat eksistensi dan legitimasi Anggota DPR, karena masyarakat dapat mengetahui aktivitas, program, ataupun inisiatif Anggota Dewan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAKIP Biro Persidangan I Tahun 2021 sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### a. Capaian Kinerja

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.

#### b. Evaluasi Capaian Kinerja

#### c. Akuntabilitas Keuangan

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Daftar Tabel
2. Lain -lain



## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN TAHUN 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada.

Sebagai unit yang berada di bawah Deputi Persidangan, di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Persidangan, terdapat 3 (tiga) sasaran program yang memuat 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Pencantuman PK Deputi Bidang Persidangan Tahun 2021 dalam laporan ini sangat dibutuhkan untuk melihat keselarasan antara PK Deputi Bidang Persidangan dan PK Biro Persidangan I.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB
		2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,22
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	B

## B. PERJANJIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN I TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai komitmen Kepala Biro Persidangan I untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2021 terdiri atas 1 (satu) sasaran program, yang memuat 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja Biro Persidangan I selaras dengan indikator kinerja Deputi Bidang Persidangan.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah</b>	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,31
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	91%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2021

## C. ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Biro Persidangan I dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI tahun 2021. Alokasi pagu anggaran Biro Persidangan I pada tahun 2021 sebesar Rp9.565.929.000,00.

## D. METODE PENGHITUNGAN

Metode Penghitungan:

### 1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi I s.d. Komisi XI. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan kepada Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung capaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

### 2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terselesaikannya skenario dan risalah rapat pada rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Anggota DPR. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

### 3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” dilakukan melalui survei kepada Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

**Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan**

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	2,60 - 3,064	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	B	Baik
88,31 - 100,00	3,5324 - 4,000	A	Sangat Baik

### 4. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan I

Penghitungan kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan I” dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran terhadap DIPA.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator kinerja, dan target hasil capaian selama satu tahun.

Pada tahun 2021, penetapan indikator kinerja telah berorientasi pada *outcome*. Hal ini sejalan dengan masukan/arahan dari KemenPAN & RB, bahwa kinerja dari unit Eselon II harus memberikan *impact* bagi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Jenderal DPR RI serta tujuannya dalam rangka memberikan dukungan pelayanan yang prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan termasuk di dalamnya dukungan administrasi dan persidangan, Biro Persidangan I pada Tahun 2021 telah menetapkan 1 (satu) sasaran yaitu **Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dan Risalah** dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan.

Adapun capaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi/Capaian Tahun 2021**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI/ CAPAIAN
<b>Satker Setjen</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dan Risalah</b>	1	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	<b>100%</b>
	2	Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	<b>100%</b>
	3	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,31	<b>Survey masih dalam proses</b>
	4	Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	91%	<b>97,44%</b>

Selanjutnya dalam menjalankan fungsi koordinasi, Biro Persidangan I mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Persidangan I. Pada Tahun 2021 Biro Persidangan I mampu menyelesaikan semua indikator kerjanya dengan baik dan dicapai sesuai target.

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Tingkat capaian kinerja dari tujuan strategis yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama Biro Persidangan I serta realisasi dari indikator kinerja Biro Persidangan I pada Tahun Anggaran 2021, baik realisasi pelaksanaan program maupun realisasi anggaran berdasarkan tabel Capaian Kinerja Biro Persidangan dapat dijelaskan di bawah ini.

### **1. Analisis Capaian Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I s.d. XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk sasaran program dan tiap indikator kinerja, sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100 %	100%

**Tabel 3.2.**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan**  
**Komisi I s.d. Komisi XI yang Dimanfaatkan oleh DPR RI**

INDIKATOR KINERJA	KINERJA	
	TARGET	CAPAIAN
<b>Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang Dimanfaatkan oleh DPR RI:</b>		
1. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi I	100%	<b>100%</b>
2. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi II	100%	<b>100%</b>
3. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi III	100%	<b>100%</b>
4. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi IV	100%	<b>100%</b>
5. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi V	100%	<b>100%</b>
6. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi VI	100%	<b>100%</b>
7. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi VII	100%	<b>100%</b>
8. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi VIII	100%	<b>100%</b>
9. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi IX	100%	<b>100%</b>
10. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi X	100%	<b>100%</b>
11. Persentase skenario dan laporan singkat Persidangan Komisi XI	100%	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 3.2., bahwa capaian persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI, dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah mencapai 100%, yang meliputi skenario dan laporan singkat Komisi I s.d. Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2020–2021 serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2021–2022, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen per masa sidang untuk pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Perencanaan tersebut sejalan dengan Agenda DPR RI yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR RI pada setiap awal masa sidang (*Pasal 51 huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa Badan Musyawarah bertugas menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya*).

Dalam mendukung kegiatan Dewan melaksanakan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan, Biro Persidangan I menyiapkan beberapa dokumen materi persidangan di Komisi yang meliputi:

#### **a. Skenario Rapat**

Skenario rapat adalah suatu kertas kerja yang dipergunakan sebagai acuan Pimpinan Rapat pada pelaksanaan rapat, yang berisikan informasi antara lain penyampaian jenis rapat, sifat rapat, kuorum rapat, tema rapat dan poin-poin yang terkait dengan tema yang akan dibahas sebagai gambaran awal bagi peserta rapat dan informasi pendukung lainnya jika diperlukan.

Skenario rapat digunakan sebagai panduan bagi Pimpinan Rapat untuk memimpin dan mengendalikan rapat, agar rapat berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran, serta tidak menyimpang dari substansi yang tengah dibahas.

*Output* : Tersedianya skenario rapat sebelum rapat dimulai, yang disesuaikan dengan materi pembahasan dan peraturan perundang-undangan.

*Outcome* : Rapat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan materi rapat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memperlancar proses pengambilan keputusan.

#### **b. Laporan Singkat Rapat**

*Laporan singkat adalah Laporan yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat (Pasal 303 ayat (3) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib)*

*Output* : Tersedianya laporan singkat yang memuat gambaran singkat proses pelaksanaan rapat dan kesimpulan dan/atau keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.

*Outcome* : Laporan singkat hasil rapat dapat menjadi bahan dan informasi bagi

Anggota DPR serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk melakukan tindak lanjut hasil keputusan.

Adapun pelaksanaan Rapat-Rapat Komisi I s.d. Komisi XI pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.**  
**Jumlah Rapat-rapat Komisi I s.d. Komisi XI Tahun 2021**  
**Berdasarkan 3 Fungsi DPR RI**

**RAPAT-RAPAT FUNGSI LEGISLASI**

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VI I	VI II	IX	X	XI
1	MS III	5	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
2	MS IV	5	2	1	2	0	1	2	9	1	4	0
3	MS V	6	3	1	4	6	5	2	3	0	6	17
4	MS I	1	1	7	4	8	3	1	3	0	6	18
5	MS II	3	1	10	4	12	2	0	3	0	18	4

**RAPAT-RAPAT FUNGSI ANGGARAN**

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS III	8	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
2	MS IV	-	0	0	1	0	8	0	0	0	0	6
3	MS V	8	11	7	13	13	14	9	12	13	12	13
4	MS I	17	8	--	10	13	14	16	8	19	16	7
5	MS II	-	0	--	6	0	0	0	1	0	0	12

**RAPAT-RAPAT FUNGSI PENGAWASAN**

NO	MASA SIDANG	KOMISI										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	MS III	10	7	3	11	13	10	20	9	22	20	17
2	MS IV	6	8	8	21	13	6	23	8	15	16	14
3	MS V	19	8	4	21	2	19	19	8	10	9	10
4	MS I	3	7	9	9	2	10	23	15	13	10	11
5	MS II	7	7	5	16	2	16	12	6	8	16	21

**2. Analisis Capaian Persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang Dimanfaatkan oleh DPR RI**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk sasaran program dan tiap indikator kinerja, sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	Persentase skenario dan risalah Rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%

Sesuai Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa Rapat Paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali Rapat Paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

*Penjadwalan Rapat Paripurna ditentukan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR mengingat Badan Musyawarah bertugas menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah dan jangka waktu penyelesaian RUU dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPR untuk mengubahnya (Pasal 51 huruf a Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI).*

*Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir dan undangan yang hadir. (Pasal 301 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib).*

Pada tahun 2021, target Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang Dimanfaatkan oleh DPR RI adalah 100% dalam 5 masa sidang yaitu Masa Persidangan III, IV, dan V Tahun Sidang 2020–2021 serta Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2021-2022 dan capaian persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI telah terpenuhi sebesar 100%.

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Persentase Skenario dan Risalah Rapat**  
**Persidangan Paripurna yang Dimanfaatkan oleh DPR Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	CAPAIAN	
Persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang Dimanfaatkan oleh DPR	100%	100%	

Adapun kegiatan Rapat-Rapat Paripurna tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Tabel Rekapitulasi Penyelenggaraan Rapat Paripurna Tahun 2021**

LAPORAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA DPR RI SELAMA TAHUN 2021		
NO	RAPAT PARIPURNA	AGENDA RAPAT PARIPURNA
1.	Rapat Paripurna ke 11 masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 11 Januari 2021)	Pidato Ketua DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.
2.	Rapat Paripurna ke 12 masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 (Kamis, 21 Januari 2021)	Laporan komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan ( <i>fit and proper test</i> ) terhadap Calon Kapolri dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan didahului dengan Pelantikan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
3.	Rapat Paripurna ke 13 masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 (Rabu, 10 Februari 2021)	1. Laporan komisi II atas Hasil Uji Kelayakan ( <i>fit and proper test</i> ) terhadap Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 2. Laporan komisi III atas hasil uji kelayakan ( <i>fit and</i>

		<p><i>proper test</i>) terhadap calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc pada mahkamah Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan komisi IX atas hasil uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap calon anggota Dewan Pengawas BPJS ketenagakerjaan dan calon anggota dewan pengawas BPJS kesehatan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</li> <li>4. Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;</li> <li>5. Penetapan Perpanjangan Terhadap Pembahasan Rancangan Undnag-Undang Tentang Penanggulangan Bencana dan Penetapan Perpanjangan Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan; dan</li> <li>6. Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.</li> </ol>
4.	Rapat Paripurna ke 14 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 8 Maret 2021)	Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
5.	Rapat Paripurna ke 15 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 (Selasa, 23 Maret 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan badan legislasi DPR RI mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.</li> <li>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republic Indonesia dan Negara-negara EFTA (<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and the EFTA states</i>).</li> </ol>
6.	Rapat Paripurna ke 16 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 (Jumat, 9 April 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap rancangan undang undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republic Indonesia dan Negara-negara EFTA (<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States</i>);</li> <li>2. Laporan komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan terhadap Kantor Akuntan Public (KAP) yang diajukan BPK dan Menteri Keuangan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</li> <li>3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU usul DPR RI;</li> <li>4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-</li> </ol>

		<p>Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Laporan BURT DPR RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2022. dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</li> <li>6. Persetujuan Fraksi-Fraksi terhadap Pertimbangan Penggabungan dan Pembentukan Kementerian; dan</li> <li>7. Pidato Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.</li> </ol>
7.	Rapat Paripurna ke 17 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Kamis, 6 Mei 2021)	Pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. Dilanjutkan dengan Pelantikan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
8.	Rapat Paripurna ke 18 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Kamis, 20 Mei 2021)	Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022.
9.	Rapat Paripurna ke 19 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Selasa, 25 Mei 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandangan Fraksi fraksi atas penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (ppkf) RAPBN tahun anggaran 2022.</li> <li>2. Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi.</li> </ol>
10.	Rapat Paripurna ke 20 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 31 Mei 2021)	Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022.
11.	Rapat Paripurna ke 21 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Selasa, 22 Juni 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2020 oleh BPK RI;</li> <li>2. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2020 oleh BPK RI;</li> <li>3. Penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang penanggulangan bencana dan RUU tentang perlindungan data pribadi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</li> <li>4. Penetapan Mitra Kerja komisi VI, komisi VII, dan komisi X DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.</li> </ol>
12.	Rapat Paripurna ke 22 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Selasa, 6 Juli 2021)	Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.
13.	Rapat Paripurna ke 23 masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (Kamis, 15 Juli 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah;</li> <li>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan kedua atas UU</li> </ol>

		<p>Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan komisi VII DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap Calon Ketua dan Anggota Komite BPH MIGAS Masa Jabatan 2021-2025 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</li> <li>4. Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</li> <li>5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI;</li> <li>6. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;</li> <li>7. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram; dan</li> <li>8. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Perpanjangan waktu Pembahasan RUU; <ol style="list-style-type: none"> <li>a) RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>b) RUU tentang Landas Kontinen. dilanjutkan dengan Pegambilan Keputusan.</li> </ol> </li> <li>9. Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.</li> </ol>
14.	Rapat Paripurna ke I masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 16 Agustus 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022; dan</li> <li>2. Pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan.</li> </ol>
15.	Rapat Paripurna ke II masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 19 Agustus 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020</li> <li>2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta nota Keuangannya.</li> </ol>

16.	Rapat Paripurna ke III masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 (Selasa, 24 Agustus 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020</li> <li>2. Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.</li> </ol>
17	Hut DPR RI ke-76 tahun sidang 2020-2021 (Selasa, 31 Agustus 2021)	Pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021.
18.	Rapat Paripurna ke IV masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 (Selasa, 7 September 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020</li> <li>2. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan ASEAN agreement on electronic commerce (persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik)</li> <li>3. Laporan badan legislasi DPR RI terhadap Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</li> </ol>
19.	Rapat Paripurna ke V masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 (Selasa, 21 September 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</li> <li>2. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota BPK RI Periode 2021-2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</li> <li>3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters);</li> <li>4. Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung Tahun 2021 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</li> </ol>
20	Rapat Paripurna ke VI masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 (Kamis, 30 September 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan Keputusan terhadap Pemberhentian Wakil Ketua DPR RI;</li> <li>2. Penetapan Penggantian Wakil Ketua DPR RI;</li> <li>3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;</li> <li>4. Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</li> </ol>

		<p>5. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pendidikan Kedokteran, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI;</p> <p>6. Persetujuan Perpanjangan Waktu Terhadap Pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUU tentang Landas Kontinen;</li> <li>- RUU tentang Praktek Psikologi;</li> <li>- RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</li> </ul> <p>7. Penetapan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p>
21.	Rapat Paripurna ke VII masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 Kamis, 7 Oktober 2021	<p>1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif komisi II DPR RI, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUU tentang provinsi Sulawesi selatan;</li> <li>- RUU tentang provinsi Sulawesi tengah;</li> <li>- RUU tentang provinsi Sulawesi tenggara;</li> <li>- RUU tentang provinsi sulawesi utara;</li> <li>- RUU tentang provinsi kalimantan timur;</li> <li>- RUU tentang provinsi Kalimantan selatan;</li> <li>- RUU tentang provinsi Kalimantan barat;</li> </ul> <p>Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI;</p> <p>2. Persetujuan Perpanjangan Waktu terhadap pembahasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana;</li> <li>b) Rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang apatur sipil Negara.</li> </ul> <p>Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;</p> <p>3. Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;</p> <p>4. Pidato ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.</p>
22.	Rapat Paripurna ke 8 masa persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 1 November 2021)	<p>Pidato pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. (Dilanjutkan dengan pelantikan Anggota pengganti antarwaktu DPR RI).</p>
23.	Rapat Paripurna ke 9 masa persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 (Senin, 8 November 2021)	<p>Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (<i>Fit and Proper Test</i>) Calon Panglima TNI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.</p>
24.	Rapat Paripurna ke 10 masa persidangan II tahun sidang 2020-2021 (Selasa, 7 Desember 2021)	<p>1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 oleh BPK RI.</p> <p>2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 3 (Tiga) Rancangan Undang-Undang, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan</li> </ul>

		<p>Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;</p> <p>b) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;</p> <p>c) Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.</p> <p>3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;</p> <p>4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>6. Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>7. Persetujuan Perpanjangan Waktu Terhadap Pembahasan</p> <p>a) RUU tentang Landas Kontinen;</p> <p>b) RUU tentang Pelindungan data Pribadi;</p> <p>c) RUU tentang Acara Perdata;</p> <p>d) RUU tentang Praktik Psikologi; dan</p> <p>e) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.</p> <p>8. Penetapan Keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). (didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024).</p>
25.	Rapat Paripurna ke 11 masa persidangan II tahun sidang 2020-2021 (Kamis, 16 Desember 2021)	<p>1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan. atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan;</p> <p>2. Pidato ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.</p>

Sumber: Bagian Persidangan Paripurna 2021

### 3. Analisis Capaian terhadap Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,31	Survey masih dalam proses

Capaian Indeks kepuasan pengguna terhadap dukungan Sekretariat Jenderal DPR diukur dari pelaksanaan survei. Survei tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017).

Kegiatan survei untuk Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan pada Tahun 2021 masih dalam proses. Sebagai informasi, pada Tahun 2020, Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan pada Tahun 2020 sebesar 3,30 dari target sebesar 3,30. Dalam hal ini, pada Tahun 2020 target untuk Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan tercapai.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2021, Biro Persidangan I mengelola anggaran sebesar Rp9.565.929.000,00. **Berkeaan dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Refocusing pada Anggaran Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal DPR juga mengalami Refocusing Anggaran Tahun 2020 untuk semua unit dan Biro Persidangan I juga mengalami Refocusing anggaran sebesar Rp1.145.394.000, dengan demikian Anggaran Biro Persidangan I menjadi sebesar Rp7.163.788.000 dan realisasinya sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp9.321.039.850,00 atau 97,44% (table 3.6)**

Tabel 3.5.

### Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	CAPAIAN	
			REALISASI	%
	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	Rp9.565.929.000,00	Rp9.321.039.850,00	97,44

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran Biro Persidangan I Tahun 2021

Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibanding realisasi Deputi Bidang Persidangan, namun masih lebih rendah dibanding realisasi Setjen DPR RI. Realisasi anggaran Deputi Bidang Persidangan sebesar **95,04%** dan realisasi anggaran Setjen DPR RI sebesar **97,45%** (table 3.7).

**Tabel 3.6**  
**Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021**

No	Uraian	Biro Persidangan I	Deputi Bid. Persidangan	Setjen DPR RI
4.	Realisasi Anggaran	97,44%	<b>95,04%</b>	<b>97,45%</b>

Di lingkup internal Biro Persidangan I, terdapat 4 (empat) unit kerja dengan realisasi sebesar 100% yaitu Bagian Sekretariat Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IX. Adapun realisasi unit kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Biro Persidangan I sangat baik, secara umum sudah di atas realisasi Biro Persidangan I. Kendala realisasi anggaran berada di bawah pengelolaan Biro, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terserap secara optimal yaitu kegiatan rapat, mengundang narasumber, dan perjalanan dinas. Kegiatan-kegiatan tersebut terkendala adanya pandemi COVID-19. Semula akan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*), namun harus dilaksanakan secara daring/virtual sehingga ada beberapa pos anggaran yang tidak dapat direalisasikan.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Biro Persidangan I beserta jajarannya serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro Persidangan I Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, meski dalam kondisi pandemi tetap menghasilkan *outcome* dan *output* yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Di masa yang akan datang kinerja yang telah dihasilkan akan terus ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan kepada Anggota DPR RI yang semakin tinggi dan sesuai dengan salah satu tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang

ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020–2024, yaitu terwujudnya dukungan persidangan dan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Biro Persidangan I selalu berupaya melaksanakan kinerja secara optimal dan terus melakukan upaya perbaikan. Dengan dukungan SDM yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Persidangan I yang telah bekerja sebaik mungkin, pada tahun 2021 Biro Persidangan I telah mampu menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, hal ini tercermin pada pencapaian seluruh indikator kinerja.

Tahun 2021 ini, Biro Persidangan I mampu mencapai target terkait dengan persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I s.d. Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI, persentase skenario dan risalah rapat persidangan paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan, dan persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I.

Untuk itu, pada tahun mendatang Biro Persidangan I diharapkan dapat terus memberikan dukungan layanan persidangan dan risalah bagi kegiatan DPR RI dalam menjalankan fungsinya, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Jakarta, Januari 2022  
Kepala Biro Persidangan I,

Ttd.

**Suprihartini, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197101061990032001